



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BATAM

Perubahan **RENJA** 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

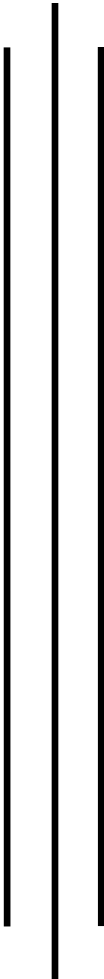
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 20 Agustus 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batam



RIAMA MANURUNG, SH., MH
NIP. 197005151997032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI..... **ii**

DAFTAR TABEL **iii**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN) **6**

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 21

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **24**

BAB IV PENUTUP..... **40**

4.1 Catatan Penting 40

4.2 Kaidah Pelaksanaan 40

4.3 Rencana Tindak Lanjut 41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II 11

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II..... 19

Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagupada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2026.....32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah

menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 39);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1632);

8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1721).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 -2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP
4.1	Catatan Penting
4.2	Kaidah Pelaksanaan
4.3	Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum memenuhi target kinerja yang direncanakan. Hal ini disebabkan sebagian keluaran kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian pada semester II.
 - a. Subkegiatan Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum memenuhi target tahapan yang direncanakan. Dari target keluaran tahunan sebanyak 37 dokumen, sampai dengan Triwulan II telah terealisasi 11 dokumen atau sebesar 29,72%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyusunan bahan rumusan

kebijakan masih perlu ditingkatkan dan diselesaikan pada semester II.

- b. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Realisasi subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 juga belum memenuhi target tahapan yang direncanakan. Dari target keluaran tahunan sebanyak 65 orang, sampai dengan Triwulan II baru terealisasi sebanyak 4 orang atau sebesar 6,15%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi masih perlu dipercepat pada semester II melalui peningkatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait.

Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial masih memerlukan percepatan pelaksanaan untuk memenuhi target tahapan yang telah ditetapkan. Pada semester II akan dilakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan, peningkatan koordinasi lintas sektor serta percepatan penyelesaian keluaran kegiatan agar target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kegiatan telah melaksanakan 7 kegiatan sosialisasi pendidikan politik dari target 14 kegiatan atau sebesar 50%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan tahapan semester pertama tahun berjalan. Selain itu, persentase pendidikan politik yang dilaksanakan mencapai 45,78% dari target tahunan 95% dan masih dalam tahapan pelaksanaan sesuai rencana.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini telah melaksanakan penyediaan jasa penunjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan semester pertama. Indikator kegiatan menunjukkan realisasi sebesar 50% dari target tahunan 100%, sehingga pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan periode evaluasi Triwulan II.

3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Secara keseluruhan kegiatan telah menghasilkan 5 dokumen dari target 7 dokumen atau sebesar 71,42%. Dengan capaian tersebut, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II telah berjalan dengan baik dan sebagian besar target keluaran telah terealisasi.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Subkegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Indikator kinerja berupa jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 100%

5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator kinerja program berupa Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dengan target tahunan sebesar 87%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target tahapan yang ditetapkan sebesar 41,58%, sedangkan realisasi telah mencapai 47,79%. Dengan demikian, capaian sampai dengan Triwulan II telah memenuhi target tahapan yang direncanakan.

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indikator kinerja program berupa Persentase Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang dilaksanakan memiliki target tahunan sebesar 95%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target tahapan yang ditetapkan sebesar 50%, sedangkan realisasi telah mencapai 52,63%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama telah memenuhi target tahapan sampai dengan Triwulan II.

Selain itu, indikator Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif memiliki target tahunan sebesar 100%, dengan target tahapan sampai dengan Triwulan II sebesar 89% dan realisasi sebesar 89%. Dengan demikian, capaian tersebut telah sesuai dengan target tahapan yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembentukan dan penguatan Satgas Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR) telah berjalan sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang ditetapkan.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, tidak terdapat program dan kegiatan yang realisasi kinerja hasil/keluarannya melebihi target yang telah direncanakan. Seluruh capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II masih berada dalam

batas target yang telah ditetapkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, pada periode evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 tidak terdapat program dan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai realisasi yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Capaian yang telah diperoleh selanjutnya akan terus dipantau dan dievaluasi pada pelaksanaan semester II untuk memastikan target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
						Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Umum				
						Bidang Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik				
						Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74.20	-	-
							Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	95	-	-
						Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	20%	20%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	-
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1 Lporan	33.33%
						Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	56.50%	56.50%
						Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 orang/bulan	46 orang/bulan	88.46%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	12%	-	-
						Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	-	-
						Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	-	-
						Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran	100%	62.5%	62.5%
						Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
						Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	2 Paket	50%
						Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-
						Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	1 Paket	50%
						Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%
						Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	36.53%	36.53%
						Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	52 Unit	31 Unit	59.61%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
						Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	17 Unit	50%
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	-
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-
						Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	50%	50%
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 Laporan	7 Laporan	53.84%
						Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	67%	67%
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	1 Unit	1 Unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
					Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	3 Unit	3 Unit	100%
					Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	-	-
					PROGRAM : PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Dilaksanakan	100%	43%	43%
					Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kebijakan Ideologi dan Karakter Kebangsaan yang dihasilkan	7 Dokumen	5 Dokumen	71.42%
					Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	300 Orang	138 Orang	46%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
					Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	600 Keluarga	-	-
					Sub Kegiatan : Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	60 Orang	50 Orang	83.33%
					Sub Kegiatan: Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	3 Dokumen	1 Dokumen	33.33%
					Sub Kegiatan: Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	25 Dokumen	7 Dokumen	28%
					PROGRAM: PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik yang dilaksanakan	95%	43.50%	45.78%
					Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	1. Jumlah sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan	14 Kegiatan	7 Kegiatan	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
					Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2. Persentase ketepatan dan kesesuaian laporan pertanggungjawaban partai politik	80%	65%	81.25%
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	195 Orang	49 Orang	25.12%
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 Laporan	6 Laporan	40%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
						PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	87%	41.58%	47.79%
						Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan	40 Rekomendasi	20 Rekomendasi	50%
						Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.430 Orang	284 Orang	8.27%
						PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1. Persentase Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama yang dilaksanakan	95%	50%	52.63%
							2. Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	100%	89%	89%
						Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar)	64 Kelurahan	57 Kelurahan	89.06%
							2. Persentase Ketahanan keluarga yang difasilitasi	34%	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.754 Orang	297 Orang	16.93%
					PROGRAM : PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	85%	-	-
					Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Rekomendasi forum kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah	20 Rekomendasi	-	-
						2. Persentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman Kewaspadaan dan Deteksi Dini	85%	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
					Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantaun Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitas Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfik di daerah yang disusun	37 Dokumen	11 Dokumen	29.72%
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	65 Orang	4 Orang	6.15%
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase masyarakat sasaran dan ASN yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persentase	95	Persentase	25	
2	Persentase masyarakat dan partai politik yang dibina	Persentase	91	Persentase	41	
3	Persentase Organisasi masyarakat yang aktif dan berkinerja	Persentase	70	Persentase	25	
	Persentase konsolidasi kerukunan antar agama	Persentase	100	Persentase	33.33	
4	Persentase Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR)	Persentase	90	Persentase	89	
5	Persentase Penanganan Potensi Konflik	Persentase	85	Persentase	68.57	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	Nilai	-	Dilakukan penilaian pada TW IV

1. Persentase masyarakat sasaran dan ASN yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- Capaian sampai dengan TW II sebesar 25% masih di bawah target tahunan 95%. Kondisi ini disebabkan pelaksanaan kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pada semester berikutnya perlu dioptimalkan agar target tahunan dapat tercapai.

2. Persentase masyarakat dan partai politik yang dibina
Pencapaian kinerja sampai dengan TW II sebesar 41% dari target tahunan 91%. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat dan partai politik telah dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan politik, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi dengan pihak terkait. Meskipun capaian masih di bawah target tahunan, kegiatan masih berlanjut pada TW III dan TW IV. Percepatan dan optimalisasi pelaksanaan pembinaan serta peningkatan koordinasi dengan partai politik dan unsur masyarakat diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja sampai dengan akhir tahun.
3. a. Persentase Organisasi masyarakat yang aktif dan berkinerja
Pencapaian kinerja sampai dengan TW II sebesar 25% dari target tahunan 70%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan telah mulai dilaksanakan, namun belum seluruh organisasi sasaran mendapatkan pembinaan secara optimal. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bertahap. Pada TW III dan TW IV akan dilakukan optimalisasi pembinaan, pemberdayaan, koordinasi dan pemantauan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan keaktifan dan kinerja organisasi.
- b. Persentase konsolidasi kerukunan antar agama
Pencapaian kinerja sampai dengan TW II sebesar 33,33% dari target tahunan 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses konsolidasi kerukunan antaragama telah berjalan melalui koordinasi dan komunikasi dengan unsur keagamaan serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pelaksanaan konsolidasi masih berlangsung secara bertahap dan akan dilanjutkan pada TW III dan TW IV. Penguatan koordinasi, komunikasi dan sinergi antarumat beragama akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas kerukunan serta mendukung pencapaian target 100% pada akhir tahun.
4. Persentase Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR).
Pencapaian kinerja sampai dengan TW II sebesar 89%, atau telah mencapai sekitar 98,89% dari target tahunan 90%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan telah mendekati target yang ditetapkan. Pelaksanaan program Kelurahan Bersinar telah memberikan hasil positif melalui pembinaan, koordinasi, sosialisasi dan penguatan peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan

selisih capaian sebesar 1% dari target tahunan, melalui optimalisasi kegiatan pada TW III dan TW IV, target 90% diproyeksikan dapat tercapai.

5. Persentase Penanganan Potensi Konflik.

Pencapaian kinerja sampai dengan TW II sebesar 68,57%, atau sekitar 80,67% dari target tahunan 85%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar target penanganan potensi konflik telah dapat direalisasikan. Penanganan dilakukan melalui pemantauan kondisi wilayah, koordinasi, fasilitasi penyelesaian permasalahan, serta penguatan deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi konflik. Dengan meningkatkan koordinasi dan pemantauan pada TW III dan TW IV, capaian kinerja diharapkan dapat memenuhi target 85% pada akhir tahun.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian kinerja belum dapat diukur sampai dengan TW II karena pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat direncanakan dilaksanakan pada TW IV. Oleh karena itu, belum terdapat nilai realisasi pada periode TW II. Pelaksanaan pengukuran akan dilakukan sesuai jadwal untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam masih menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian. Isu-isu tersebut dipengaruhi oleh perkembangan dinamika sosial, politik, ekonomi, kemajuan teknologi informasi, serta karakteristik Kota Batam sebagai daerah perbatasan dan kawasan strategis nasional. Isu-isu penting tersebut dijabarkan berdasarkan bidang penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Isu-Isu Penting Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa
 - a. Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara kepada seluruh lapisan masyarakat.

- b. Masih rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan penguatan karakter kebangsaan.
 - c. Meningkatnya penyebaran informasi yang mengandung paham intoleransi, radikalisme, dan hoaks melalui media digital.
 - d. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam penguatan ideologi Pancasila.
 - e. Perlunya inovasi metode sosialisasi kebangsaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
2. Isu-Isu Penting Bidang Politik Dalam Negeri
- a. Belum optimalnya pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas partisipasi politik.
 - b. Masih perlunya peningkatan kapasitas partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat.
 - c. Belum optimalnya literasi politik masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula.
 - d. Meningkatnya potensi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian yang dapat memengaruhi stabilitas politik daerah.
 - e. Perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas politik menjelang maupun setelah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
3. Isu-Isu Penting Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan
- a. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
 - b. Perlunya peningkatan kualitas koordinasi dalam menjaga kerukunan umat beragama.
 - c. Meningkatnya dinamika sosial masyarakat akibat pertumbuhan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat Kota Batam.
 - d. Belum optimalnya deteksi dini terhadap potensi kerawanan sosial yang dapat mengganggu ketahanan masyarakat.
 - e. Perlunya peningkatan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kondusivitas daerah.

4. Isu-Isu Penting Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- a. Belum optimalnya sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial di masyarakat.
- b. Perlunya penguatan kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam pelaksanaan deteksi dini dan pelaporan.
- c. Meningkatnya potensi konflik sosial akibat perkembangan isu politik, ekonomi, maupun sosial budaya.
- d. Belum optimalnya koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi dalam upaya pencegahan konflik.
- e. Perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Seluruh isu tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam agar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah semakin efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, demokratis, dan berwawasan kebangsaan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

- I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Mengalami pengurangan anggaran dari Rp3.433.400 menjadi Rp933.400 atau berkurang sebesar Rp2.500.000, dengan target tetap sebanyak 2 dokumen.
 - 2. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
Mengalami pengurangan anggaran dari Rp1.919.000 menjadi Rp419.000 atau berkurang sebesar Rp1.500.000, dengan target tetap sebanyak 3 laporan.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Mengalami pengurangan anggaran dari Rp9.114.720.365 menjadi Rp8.518.123.644 atau berkurang sebesar Rp596.596.721, serta penyesuaian target penerima gaji dan tunjangan dari 52 orang/bulan menjadi 46 orang/bulan.
 - 2. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Mengalami pengurangan anggaran dari Rp94.360.000 menjadi Rp80.360.000 atau berkurang sebesar Rp14.000.000, dengan target tetap sebanyak 12 dokumen.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Anggaran berubah dari Rp45.508.800 menjadi Rp0, atau berkurang sebesar Rp45.508.800.
2. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Mengalami pengurangan anggaran dari Rp66.594.000 menjadi Rp32.475.000, atau berkurang Rp34.119.000. Target peserta pelatihan berkurang dari 6 orang menjadi 3 orang.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Mengalami pengurangan anggaran dari Rp10.726.000 menjadi Rp3.122.000, atau berkurang Rp7.604.000. Target tetap 1 paket.
 2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Mengalami pengurangan anggaran dari Rp200.532.100 menjadi Rp152.761.600, atau berkurang Rp47.770.500. Target meningkat dari 4 paket menjadi 5 paket.
 3. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Mengalami pengurangan anggaran dari Rp52.713.000 menjadi Rp19.413.000, atau berkurang Rp33.300.000. Target tetap 2 paket.
 4. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran berkurang dari Rp483.415.000 menjadi Rp325.336.000, atau berkurang Rp158.079.000. Target tetap 12 laporan.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

- atau Lapangan
 Anggaran bertambah dari Rp341.568.000 menjadi Rp375.000.000, atau bertambah Rp33.432.000. Target tetap 1 unit.
2. Subkegiatan Pengadaan Mebel
 Anggaran berkurang dari Rp466.496.000 menjadi Rp371.860.200, atau berkurang Rp94.635.800. Target berkurang dari 52 unit menjadi 38 unit.
 3. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Anggaran bertambah dari Rp470.796.600 menjadi Rp515.281.600, atau bertambah Rp44.485.000. Target berkurang dari 34 unit menjadi 33 unit.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Anggaran tetap sebesar Rp2.430.000, dengan target tetap 12 laporan. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan pagu pada subkegiatan ini.
 2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Anggaran berkurang dari Rp131.655.961 menjadi Rp43.801.987, atau berkurang Rp87.853.974. Target tetap 13 laporan.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Anggaran berkurang dari Rp39.780.000 menjadi Rp34.740.000, atau berkurang Rp5.040.000. Target tetap 1 unit.
 2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Anggaran bertambah dari Rp42.740.000 menjadi

Rp49.020.000, atau bertambah Rp6.280.000. Target tetap 3 unit.

3. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tidak mengalami perubahan anggaran, yaitu tetap sebesar Rp53.000.000, dengan target tetap 76 unit.

II Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Mengalami pengurangan anggaran dari Rp800.283.000 menjadi Rp616.669.000 atau berkurang sebesar Rp183.614.000, dengan target tetap sebanyak 300 orang.

2. Subkegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp290.276.000, dari Rp373.988.000 menjadi Rp83.712.000, dengan target tetap sebanyak 600 keluarga.

b. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Mengalami pengurangan anggaran dari Rp800.283.000 menjadi Rp616.669.000 atau berkurang sebesar Rp183.614.000, dengan target tetap sebanyak 300 orang.

2. Subkegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp290.276.000, dari Rp373.988.000 menjadi Rp83.712.000, dengan target tetap sebanyak 600 keluarga.
 3. Subkegiatan Pembentukan Paskibraka Mengalami penambahan anggaran dari Rp5.433.189.100 menjadi Rp5.930.076.900 atau bertambah sebesar Rp496.887.800, dengan penyesuaian target dari 60 orang menjadi 50 orang.
 4. Subkegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Mengalami pengurangan anggaran dari Rp490.299.500 menjadi Rp429.614.500 atau berkurang sebesar Rp60.685.000, dengan target tetap 3 dokumen.
- III Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Mengalami pengurangan anggaran dari Rp5.721.690.165

- menjadi Rp5.705.864.665 atau berkurang sebesar Rp15.825.500, dengan penyesuaian target peserta dari 195 orang menjadi 165 orang.
2. Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp163.398.800, dari Rp435.169.200 menjadi Rp271.770.400, dengan target tetap 15 laporan.
 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- IV Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
mengalami pengurangan anggaran dari Rp2.659.188.300 menjadi Rp1.455.796.300 atau berkurang sebesar Rp1.203.392.000. Perubahan tersebut juga diikuti penyesuaian target jumlah peserta dari 3.430 orang menjadi 680 orang.
- V Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 1. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Mengalami pengurangan anggaran dari Rp8.431.249.700 menjadi Rp5.189.329.500 atau berkurang sebesar Rp3.241.920.200. Perubahan anggaran tersebut disertai penyesuaian target peserta dari 1.754 orang menjadi 1.178 orang, sedangkan target jumlah kelurahan yang memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba tetap sebanyak 64 kelurahan.

VI Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1. Subkegiatan Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Mengalami penambahan anggaran dari Rp55.316.691.351,79 menjadi Rp69.937.284.506 atau bertambah sebesar Rp14.620.593.154,21, dengan peningkatan target dari 37 dokumen menjadi 42 dokumen.

2. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Mengalami pengurangan anggaran dari Rp730.484.000 menjadi Rp530.424.000 atau berkurang sebesar Rp200.060.000, dengan peningkatan target peserta dari 65 orang menjadi 596 orang.

3. Subkegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Mengalami pengurangan anggaran dari Rp1.763.092.633 menjadi Rp1.507.322.500 atau berkurang sebesar Rp255.770.133, dengan target tetap 1 dokumen.

Secara umum, perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026. Perubahan juga diarahkan untuk menyesuaikan target keluaran pada beberapa subkegiatan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pelaksanaan, tanpa mengurangi pencapaian sasaran utama penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah.

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
8.01.01	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		74.20	74.20	11.622.388.226	10.578.077.431	-1.044.310.795	
			Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		95 point poin	95 point poin				
8.01.01.2.01	Kegiatan: Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100 %	100 %	5.352.400	1.352.400	-4.000.000	
8.01.01.2.01.00.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	3.433.400	933.400	-2.500.000	
8.01.01.2.01.00.07	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	3 Laporan	1.919.000	419.000	-1.500.000	
8.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100 %	100 %	9.209.080.365	8.598.483.644	-610.596.721	
8.01.01.2.02.00.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		52 Orang/bulan	46 Orang/bulan	9.114.720.365	8.518.123.644	-596.596.721	
8.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	12 Dokumen	94.360.000	80.360.000	-14.000.000	
8.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		12 %	12 %	112.102.800	32.475.000	-79.627.800	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
8.01.01.2.05.00 02	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		45 Paket	-	45.508.800	-	-45.508.800	
8.01.01.2.05.00 09	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6 Orang	3 Orang	66.594.000	32.475.000	-34.119.000	
8.01.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 %	100 %	747.386.100	500.632.600	-246.753.500	
8.01.01.2.06.00 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	10.726.000	3.122.000	-7.604.000	
8.01.01.2.06.00 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5 Paket	200.532.100	152.761.600	-47.770.500	
8.01.01.2.06.00 05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	52.713.000	19.413.000	-33.300.000	
8.01.01.2.06.00 09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	483.415.000	325.336.000	-158.079.000	
8.01.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100 %	100 %	1.278.860.600	1.262.141.800	-16.718.800	
8.01.01.2.07.00 02	Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	341.568.000	375.000.000	33.432.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
8.01.01. 2.07.00 05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		52 Unit	38 Unit	466.496.00 0	371.860.20 0	-94.635.800	
8.01.01. 2.07.00 06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		34 Unit	33 Unit	470.796.60 0	515.281.60 0	44.485.000	
8.01.01. 2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100 %	100 %	134.085.96 1	46.231.987	-87.853.974	
8.01.01. 2.08.00 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	2.430.000	2.430.000	-	
8.01.01. 2.08.00 04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	13 Laporan	131.655.96 1	43.801.987	-87.853.974	
8.01.01. 2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 %	100 %	135.520.00 0	136.760.00 0	1.240.000	
8.01.01. 2.09.00 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	39.780.000	34.740.000	-5.040.000	
8.01.01. 2.09.00 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	3 Unit	42.740.000	49.020.000	6.280.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
8.01.01.2.09.00.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		76 Unit	76 Unit	53.000.000	53.000.000	-	
8.01.02	PROGRAM : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Dilaksanakan		100 %	100 %	7.211.879.600	7.174.192.400	-37.687.200	
8.01.02.2.01	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Kebijakan Ideologi dan Karakter Kebangsaan yang dihasilkan		7 Dokumen	7 Dokumen	7.211.879.600	7.174.192.400	-37.687.200	
8.01.02.2.01.00.04	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		300 Orang	300 Orang	800.283.000	616.669.000	-183.614.000	
8.01.02.2.01.00.06	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		600 Keluarga	600 Keluarga	373.988.000	83.712.000	-290.276.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
8.01.02.2.01.00.08	Sub Kegiatan : Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka		60 Orang	50 Orang	5.433.189.100	5.930.076.900	496.887.800	
8.01.02.2.01.00.09	Sub Kegiatan: Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		3 Dokumen	3 Dokumen	490.299.500	429.614.500	-60.685.000	
8.01.02.2.01.00.10	Sub Kegiatan: Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		25 Dokumen	25 Dokumen	114.120.000	114.120.000	-	
8.01.03	PROGRAM: PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase pendidikan politik yang dilaksanakan		95 %	95 %	6.156.859.365	5.977.635.065	-179.224.300	
8.01.03.2.01	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan		14 Kegiatan	14 Kegiatan	6.156.859.365	5.977.635.065	-179.224.300	
			Persentase ketepatan dan kesesuaian laporan pertanggungjawaban partai politik		80%	80%				

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
8.01.03. 2.01.00 03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		195 Orang	165 Orang	5.721.690.165	5.705.864.665	-15.825.500	
8.01.03. 2.01.00 05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		15 Laporan	15 Laporan	435.169.200	271.770.400	-163.398.800	
8.01.04	PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		87 %	87 %	2.659.188.300	1.455.796.300	-1.203.392.000	
8.01.04. 2.01	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi		40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	2.659.188.300	1.455.796.300	-1.203.392.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Organisasi Kemasyarakatan		Kemasyarakatan yang dilaksanakan							
8.01.04. 2.01.00 03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		3430 Orang	680 Orang	2.659.188.300	1.455.796.300	- 1.203.392.000	
8.01.05	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama yang dilaksanakan		95 %	95 %	8.431.249.700	5.189.329.500	- 3.241.920.200	
			Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif		100%	100%				
8.01.05. 2.01	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Ketahanan keluarga yang difasilitasi		34 %	34 %	8.431.249.700	5.189.329.500	- 3.241.920.200	
			Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar)		64 Kelurahan	64 Kelurahan				
8.01.05. 2.01.00 04	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama		1754 Orang	1178 Orang	8.431.249.700	5.189.329.500	- 3.241.920.200	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
8.01.06	PROGRAM : PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		85 %	85%	57.810.267.984,79	71.975.031.006	14.164.763.021,21	
8.01.06. 2.01	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Rekomendasi forum kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah		20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	57.810.267.984,79	71.975.031.006	14.164.763.021,21	
			Persentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman Kewaspadaan dan Deteksi Dini		85 %	85 %				
8.01.06. 2.01.00 02	Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantaun Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		37 Dokumen	42 Dokumen	55.316.691.351,79	69.937.284.506	14.620.593.154,21	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
8.01.06.2.01.00.04	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		65 Orang	596 Orang	730.484.000	530.424.000	- 200.060.000	
8.01.06.2.01.00.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1.763.092.633	1.507.322.500	- 255.770.133	
TOTAL							93.891.833.175,79	102.350.061.702	8.458.228.526,21	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 -2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait pemerintahan umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD